

## Peranan Sekolah Normal Islam Institut (NII) dalam Memajukan Sistem Pendidikan Islam di Aceh Tahun 1939-1945

Septian Fatianda<sup>1</sup>, Ida Hasanah<sup>2</sup>, Fahmi Arfan<sup>3</sup>, Fitriani<sup>4</sup>,  
Cut Nyak Meutia Maulida<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh

Email: [Septianfatianda@gmail.com](mailto:Septianfatianda@gmail.com)

**Abstract:** *The face of Islamic education in Aceh at the beginning of the 20th century AD was still traditionalist and seemed rigid. The people of Aceh still consider general science to be a product of Western nations and is haram. This condition was further exacerbated by the repressive attitude of the Dutch Colonial Government which strictly supervised the Dayah educational institutions (where the people of Aceh carried out the learning process). Because it is feared that it could potentially give birth to cadres who will carry out a rebellion. As a result, many duas and books were burned by the colonial authorities. In response to this problem, a group of reformist ulama who are members of the All Aceh Ulama Association (PUSA) took the initiative to establish the Normal Islamic Institute (NII) school to answer and provide solutions to the problems of Islamic education in Aceh. This research is a social history study that focuses on regional education issues. The method used is a historical method with four steps, namely heuristics/source collection, verification, interpretation and historiography. The research results show that the formation of the NII had a significant impact on educational progress in Aceh. This institution has dared to combine general science with religious science in one curriculum. Furthermore, NII as a high school also succeeded in producing visionary teachers and spreading them throughout Aceh with the mission of spreading the principles of modernity in Islamic education in Aceh.*

**Keywords:** *aceh; education; NII*

**Abstrak:** Wajah pendidikan Islam di Aceh di permulaan abad ke-20 M masih bercorak tradisional dan terkesan kaku. Masyarakat Aceh masih menganggap ilmu pengetahuan umum sebagai hasil produk bangsa Barat dan hukumnya haram. Kondisi ini semakin diperparah dengan sikap represif Pemerintah Kolonial Belanda yang mengawasi secara ketat lembaga pendidikan dayah (tempat masyarakat Aceh melakukan proses pembelajaran). Sebab dikhawatirkan bisa berpotensi melahirkan kader-kader yang akan melakukan pemberontakan. Imbasnya banyak dayah dan kitab-kitab yang dibakar oleh pihak kolonial. Merespon persoalan tersebut sekumpulan ulama reformis yang tergabung dalam organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) berinisiatif mendirikan sekolah Normal Islam Institut (NII) untuk menjawab dan memberikan solusi atas permasalahan pendidikan Islam di Aceh. Penelitian ini merupakan kajian sejarah sosial yang berfokus pada isu pendidikan daerah. Adapun metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan empat langkah yaitu heuristik/pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan NII memiliki dampak yang signifikan bagi kemajuan pendidikan di Aceh. Lembaga ini telah berani untuk menggabungkan ilmu pengetahuan umum dengan ilmu pengetahuan agama dalam satu kurikulum. Selanjutnya NII sebagai sekolah tinggi juga berhasil mencetak para guru-guru yang visioner dan disebarkan ke seluruh Aceh dengan misi menyebarkan prinsip modernitas dalam pendidikan Islam di Aceh.

**Kata Kunci:** aceh; NII; pendidikan

### PENDAHULUAN

Dalam catatan sejarah telah banyak menyebut wilayah Aceh mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam bidang pendidikan. Aceh memiliki lembaga pendidikan yang disebut dengan *dayah* dan *meunasah*. Peranan dua lembaga ini sangatlah besar bagi

peradaban Aceh di masa Kesultanan Aceh Darussalam. Bukti nyata adalah dengan menjamurnya *dayah* dan *meunasah* di hampir seluruh wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh (Hadi, 2008). Bahkan dengan kualitas pendidikannya, pada abad 16 hingga 18 Aceh sempat menjadi kiblat dalam ilmu pengetahuan Islam di wilayah Asia Tenggara (Solikah, 2013).

Banyak para tokoh ulama dan pemikir yang lahir di masa ini, sebut saja seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Nurrudin Ar-Raniry, Syeikh Abdurrauf as-Singkili, dan masih banyak yang lainnya (Kurniati, 2021). Tidak hanya itu, para ulama-ulama tersebut menjadi guru bagi muridnya di yang datang dari berbagai wilayah di nusantara seperti yang paling terkenal adalah Syeikh Burhanuddin Ulakan dan Syeikh Yusuf al-Makassari dimana karya mereka menjadi rujukan utama dalam pembelajaran Islam di wilayahnya masing-masing (Nuraini, 2014).

Kegemilangan Aceh di bidang pendidikan ini perlahan mulai meredup, hal ini disebabkan mulai melemahnya kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam dan masuknya kolonialisme Belanda. Kehadiran Belanda benar-benar telah merubah wajah pendidikan Islam di Aceh yang semakin tersudutkan. Dinamika ini bermula pada awal abad ke-20, pendidikan Aceh diwarnai dengan dinamika yang sangat kompleks. Terjadi banyak sekali polemik yang telah berimbas secara langsung terhadap kualitas pendidikan (Anis, 2015).

Masyarakat Aceh pada umumnya lebih banyak mengenyam pendidikan secara tradisional yang diberikan oleh para ulama-ulama di *dayah* dan *meunasah*. Kehadiran lembaga pendidikan tradisional ini telah banyak melahirkan santri yang kemudian menjadi kader-kader pejuang sehingga sewaktu-waktu siap untuk diterjunkan melawan Pemerintah Kolonial Belanda (R. S. & A. B. Wibowo, 2009). Kondisi ini membuat Belanda merasa khawatir apabila dibiarkan para santri ini akan sangat merepotkan misi mereka untuk menguasai wilayah Aceh.

Akhirnya Pemerintah Belanda menerapkan kebijakan untuk mengawasi secara ketat setiap *dayah*. Pengawasan ini dilakukan terhadap materi-materi yang diajarkan oleh para guru, yang apabila kedapatan mengajarkan semangat perlawanan akan langsung ditindak tegas oleh pasukan militer Belanda (Marhamah, 2018). Bahkan karena rasa amarah yang memuncak, para pasukan militer Belanda dengan sengaja membakar dan membunuh hanguskan beberapa *dayah*. Tidak hanya itu, perpustakaan yang banyak menyimpan kitab-kitab ilmu pengetahuan Islam juga dibakar oleh pasukan kolonial ini (Fatianda, 2022). Dampak nyata dari tindakan kejam Belanda ini membuat materi pelajaran yang diajarkan di *dayah* hanya berkutat pada persoalan pengetahuan Islam dan ibadah murni saja. Materi yang dipelajari seperti ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, dan ilmu kalam (Hadi, 2014).

Situasi yang cukup rumit terjadi pada masyarakat Aceh di awal abad ke-20 ini, sebagian besar ulama dan para pengikutnya masih memiliki pemahaman dan praktik ajaran Islam yang sempit (Fatianda, 2022). Ilmu-ilmu Barat seperti matematika, bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan umum lainnya dianggap tabu dalam masyarakat. Lebih buruk lagi, bahkan ada beberapa ulama Ahena yang melarang mempelajari ilmu-ilmu tersebut karena dianggap menyimpang dari nilai-nilai dan budaya Islam. Akibatnya, hal ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap konsep pendidikan *dayah* yang hanya berfokus pada studi agama tanpa mempelajari ilmu-ilmu umum (Marhamah, 2018).

Polarisasi ini menjadikan masyarakat Aceh menjadi apatis terhadap persoalan politik dan ilmu pengetahuan modern. Hal ini tampak jelas pada ulama dan santri *dayah* pada masa itu yang tidak memiliki kemampuan berbahasa asing. Mereka tidak peduli dan merasa alergi dengan bahasa Inggris, lebih parahnya penguasaan bahasa Indonesia pun masih sangat lemah. Kalaupun mereka mengetahui bahasa Arab, mereka tidak dapat menggunakannya sebagai bahasa komunikasi, apalagi untuk menulis dan mengajar. Sikap apatis masyarakat ini membuat Pemerintah Belanda begitu nyaman untuk menguasai Aceh (Amiruddin, 2004).

Kondisi ini menjadikan pendidikan Islam di Aceh benar-benar tertinggal, karena di saat yang bersamaan Pemerintah Belanda juga mendirikan sekolah rakyat (*volkschool*) yang diperuntukkan bagi anak-anak pegawai pemerintah Belanda. Sekolah ini telah menganut sistem pendidikan barat yang modern, berbanding terbalik dengan lembaga pendidikan tradisional Aceh yang jauh dari semangat kemajuan (Sufi, 1998).

Merespon keterbelakangan pendidikan yang terjadi di Aceh, para ulama-ulama yang berpikiran modernis berinisiatif untuk mencari solusi agar marwah pendidikan Islam di Aceh mampu bangkit kembali. Hal ini dilakukan tidak lain sebagai usaha untuk melawan Pemerintah Belanda dan merebut kemerdekaan. Di saat yang bersamaan, salah seorang tokoh Aceh bernama Teungku Abdul Hamid Samalanga yang sedang berada di Mekkah mengirimkan sepucuk surat kepada Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap tentang keberhasilan Ikhwanul Muslimin di Mesir dalam mereformasi pendidikan Islam tradisional menuju pendidikan modern (Ibrahimi, 1986).

Langkah kongkrit yang dilakukan oleh para ulama Aceh yang berhaluan reformis ini adalah dengan berkumpul di Peusangan, Bireun. Para ulama ini pada tanggal 5 Mei 1939 mengadakan musyawarah yang menghasilkan pendirian organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang diketuai oleh Teuku Muhammad Daud Beureueh (Anis, 2015). Organisasi ini kemudian telah berkembang dengan pesat di Aceh dengan tujuan utama organisasi ini adalah mereformasi pendidikan Islam di Aceh dengan mendirikan sebuah lembaga pendidikan Normal Islam Institut (NII). Sekolah ini menjadi pelopor bagi pendidikan Aceh yang telah menggabungkan ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum dalam satu kurikulum sekolah.

Kehadiran NII secara langsung telah membawa angin segar bagi masyarakat Aceh. Karena telah tersedia sekolah yang mampu menjawab tantangan zaman saat itu serta mampu mencetak banyak para murid yang memiliki kualifikasi pendidikan yang baik. Bahkan guru-guru yang menjadi staf pengajar di NII ini berasal dari berbagai daerah di nusantara, salah satunya adalah Muhammad Yunus yang berasal dari Sumatera Barat (Latif, 1992).

Penelitian tentang peranan NII dalam memajukan pendidikan Islam di Aceh belum banyak diteliti secara mendalam oleh para peneliti sebelumnya. Namun dari hasil penelusuran ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dan bisa menjadi rujukan diantaranya. Dalam Madhan Anis (2015) tulisan membahas tentang sejarah dan peranan organisasi PUSA terhadap lembaga pendidikan madrasah di Aceh awal abad 20. Selanjutnya dalam buku M. Nur El-Ibrahimi (1986) membahas tentang Teungku Muhammad Daud Beureueh dan peranannya dalam pergolakan di Aceh secara detail menyebutkan peranan tokoh sebagai ketua PUSA yang memprakarsai pendirian sekolah NII.

Kemudian dalam buku Hamdiah Latief (1992) yang membahas tentang PUSA dan kontribusinya dalam mereformasi pendidikan di Aceh juga secara ringkas membahas tentang kehadiran NII. Dalam tulisan Septian dan Badrun (2022) membahas tentang PUSA dan reformasi pendidikan Islam di Aceh tahun 1939-1952 menjelaskan tentang sejarah awal pembentukan PUSA dan usaha mereka dalam memajukan pendidikan Islam di Aceh. Selanjutnya dalam tulisan Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo (2009) membahas tentang sejarah dan perjalanan pendidikan Aceh dari masa ke masa. Buku yang ditulis oleh Agus Budi Wibowo (2005) membahas tentang dinamika dan peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh, meliputi peran organisasi ini dalam kehidupan sosial politik di Aceh.

Berangkat dari serangkaian literatur dan fakta sejarah di atas, maka penelitian ini menjadi menarik untuk melihat bagaimana peranan sekolah NII dalam memajukan pendidikan Islam di Aceh di tengah kolonialisasi Belanda yang semakin masif di Aceh. Selanjutnya penelitian ini menjadi penting untuk mengungkapkan perjalanan sejarah pendidikan di Aceh dari masa yang masih berkutat dengan sistem tradisional menuju pendidikan Aceh yang berhaluan reformis menuju kemajuan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah penelitian sejarah yang menggunakan studi kepustakaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban bagaimana kondisi pendidikan di Aceh pada awal abad ke-20 dan peranan sekolah NII dalam memajukan pendidikan Islam di Aceh tahun 1939-1945. Dalam penelitian ini metode yang dipakai menggunakan metode historis. Terdapat beberapa langkah dalam metode historis yang digunakan diantaranya. Pertama adalah heuristik, yang merupakan proses pengumpulan data-data sejarah baik yang berasal dari sumber tertulis maupun yang tidak tertulis (Abdurahman, 2011). Sumber yang digunakan adalah buku dan jurnal yang diperoleh dari perpustakaan serta laman website jurnal. Selanjutnya juga digunakan arsip-arsip sejarah dan surat kabar Belanda yang berisikan informasi penting tentang PUSA.

Langkah kedua adalah verifikasi, yaitu proses penyeleksian dan verifikasi sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam proses ini juga dilakukan kritik berupa kritik internal terhadap isi dari sebuah sumber dan kritik eksternal yaitu kritik terhadap kondisi fisik dari sebuah sumber (Sukmana, 2021). Langkah ketiga adalah interpretasi, yaitu proses untuk memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah ada. Dalam proses penafsiran ini dilakukan secara analisis yang mendalam dengan mengaitkan data-data sejarah beserta dengan teori-teori. Hal ini dilakukan agar mendapatkan fakta sejarah yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan (Kuntowijoyo, 2003).

Adapun langkah terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi yang merupakan proses menuliskan hasil penafsiran-interpretasi terhadap sumber sejarah. Model penulisan ini menjadi penting untuk mendapatkan satu tulisan sejarah yang kritis dan mampu menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian (Herlina, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Pendidikan Islam di Aceh Pada Awal Abad ke-20

Pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1904, perang antara pejuang Aceh dan penjajah Belanda berakhir. Hal ini ditandai dengan menyerahnya Sultan Muhammad Daud Syah sebagai sultan terakhir dari Kesultanan Aceh Darussalam. Ia sudah tidak mampu lagi menahan serangan Belanda yang terus meningkat. Kemenangan Belanda segera mempengaruhi seluruh struktur masyarakat Aceh, termasuk sistem pendidikan. (Abdullah, 1993). Pendidikan Islam tradisional mengalami kemunduran yang cukup besar. Kemunduran ini disebabkan oleh sikap represif pemerintah Belanda terhadap para ulama dan teungku serta para santri dalam pendidikan Islam tradisional.

Kebijakan Belanda ini didasarkan oleh kekhawatiran bahwa jika lembaga pendidikan *dayah* terus berkembang, tidak menutup kemungkinan bahwa ulama dan Santri militan akan kembali muncul dari *dayah* dan melakukan perlawanan besar-besaran terhadap pemerintah kolonial (Shaleh, 1982). Untuk mencegah bahaya pemberontakan, Belanda akhirnya mengambil kebijakan yang cukup ketat dalam mengawasi segala bentuk aktivitas *dayah*. Mereka bahkan bertindak ekstrem dengan membakar sejumlah *dayah* tradisional beserta perpustakaan yang ada di dalamnya. Akibatnya, masyarakat Aceh kehilangan sejumlah ulama besar dan bahkan sumber ilmu pengetahuan yang sangat berharga berupa karya-karya ulama besar dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, baik karya ulama Aceh maupun hasil karya ulama dari Timur Tengah (Marhamah, 2018).



**Gambar 1:** Lembaga Dayah di Lamnyong

Sumber: J. C. Van Eerde, *De Volken van Nederlandsch Indie I*, Amsterdam, 1920, dalam *Mapesa.com*

Peristiwa-peristiwa tersebut menyebabkan pendidikan tradisional di Aceh sangat terbatas, sehingga tidak mampu menanamkan pengetahuan yang berhubungan semangat perjuangan dan modernisme. Satu-satunya materi yang dapat dipelajari adalah hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan ibadah murni, termasuk ilmu Tauhid, Ilmu Kalam, Tasawuf, Bahasa Arab, Fiqih dan logika (Amiruddin, 2004). Selain belajar ilmu agama di dayah, ada beberapa tempat di Aceh yang digunakan untuk pendidikan Islam, yaitu masjid dan *meunasah*. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sering digunakan sebagai tempat belajar mengajar ilmu-ilmu keislaman. Sistem pembelajarannya berdasarkan sistem *halaqah* dan diajar oleh seorang guru yang disebut *Teungku* atau *Chik*. *Meunasah* memiliki fungsi yang hampir sama dengan masjid sebagai tempat belajar ilmu keislaman, namun bedanya *meunasah* berlangsung dalam skala yang lebih kecil dan hanya diikuti oleh beberapa orang di gampong atau desa tersebut (Ibrahim, 2014).

Provokasi dan intimidasi dari pemerintah kolonial, yang secara ketat mengontrol kegiatan pendidikan tradisional di Aceh, serta fakta bahwa banyak ulama dan pengikut mereka masih disibukkan dengan ibadah akhirat, menyebabkan pemahaman Islam yang berpikiran sempit di kalangan masyarakat Aceh. Mereka dengan tegas menolak semua pengetahuan yang dihasilkan oleh Barat, seperti bahasa Inggris, matematika, dan ilmu-ilmu umum lainnya, yang dianggap tabu dan ilmu orang kafir (Anis, 2015). Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama yang mengharamkan ilmu pengetahuan dari Barat karena dianggap tidak sesuai dengan lingkungan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi konsep pendidikan dayah yang terus berfokus pada studi agama tanpa ada keinginan untuk berubah ke arah kemajuan (Fatianda, 2022).

Sebaliknya, sistem pendidikan tradisional di Aceh bersifat kaku dan kuno. Pemerintah kolonial Belanda telah mendirikan lembaga pendidikan modern yang dikenal sebagai sekolah Belanda (*Kolonial Verslag*) dan sekolah rakyat (*volkschool*) pada tahun 1907 sebagai bagian dari kebijakan politik etis (Muhajir, 2018). Di sini, para murid diajarkan mata pelajaran umum dan menerapkan kurikulum Eropa. Sayangnya, sekolah-sekolah ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan segelintir anak uleebalang atau bangsawan yang bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial. Di sisi lain, para ulama yang berpikiran modern juga mendirikan lembaga pendidikan yang disebut madrasah. Namun, madrasah-madrasah tersebut masih dalam proses pendirian dan terkadang masih menggunakan pola-pola tradisional (Alfian, 1997).



**Gambar 2.** Sekolah Rakyat (Volkschool) milik Pemerintah Belanda

*Sumber: Arsip Rakyat Merdeka.com*

Pada waktu itu telah muncul beberapa madrasah-madrasah yang secara perlahan telah mencoba menghadap ke arah kemajuan. Beberapa madrasah tersebut adalah Madrasah al-Khairiyah Masjid Raya di Banda Aceh, Madrasah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah di Idi Aceh Timur, dan Madrasah Al-Muslim di Peusangan Bireuen (Anis, 2015). Keberadaan madrasah ini tampaknya menimbulkan masalah baru. Terdapat perbedaan pandangan mengenai konsep pendidikan madrasah antara ulama dayah tradisional dan ulama reformis. Ulama dayah tradisional masih menginginkan pemisahan antara ilmu pengetahuan umum dan agama dan menekankan pentingnya mempelajari ilmu-ilmu agama di atas ilmu-ilmu umum seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah Belanda (Amiruddin, 2004). Di sisi lain, para ulama reformis percaya bahwa pendidikan di Aceh tidak akan berkembang jika pendidikan Islam di Aceh hanya berfokus pada pengetahuan agama saja.

### **Sejarah Pembentukan Sekolah Normal Islam Institut (NII)**

Pembentukan sekolah NII ini tidak terlepas dari sejarah perjalanan organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Organisasi yang diinisiasikan oleh sekelompok ulama-ulama reformis di Aceh ini merupakan sebuah wadah perjuangan pertama yang dibuat oleh masyarakat Aceh. PUSA didirikan pada tanggal 5 Mei 1939 bertempat di Madrasah Al-Muslim Peusangan, Bireuen. Setelah pembentukan organisasi ini terpilih Tgk. Muhammad Daud Bereueh sebagai ketua dan Tgk. M. Nur El Ibrahimy sebagai sekretaris (A. B. Wibowo, 2005). Selanjutnya untuk menjalankan roda organisasi dan memudahkan koordinasi antar sesama pengurus maka dibangunlah kantor utama PUSA yang berpusat di kota Sigli (Ismuha, 1996).



**Gambar 3:** Para pengurus PUSA

*Sumber: Google Image*

Sejak musyawarah yang dilakukan oleh ulama PUSA di Peusangan Bireuen ini maka telah disepakati arah dan tujuan organisasi. Terdapat empat tujuan utama yaitu pertama dengan tujuan menyiarkan dan mempertahankan syiar agama Islam. Kedua, sebagai wadah untuk menyatukan paham pada penerangan hukum-hukum Islam. Ketiga, memperbaiki dan mengintegrasikan *leerplan* pelajaran agama di sekolah agama, dan menginisiasi untuk mendirikan sebuah perguruan Islam. Keempat mendidik para pemuda serta putra-putri Islam dalam persoalan keagamaan (Jodi et al., 2023)

Tujuan PUSA pada poin tiga ini menjadi cikal bakal fokus organisasi PUSA untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan modern yang bisa merubah sistem tradisional menuju pendidikan yang lebih modernis. Kehadiran organisasi PUSA di tengah-tengah masyarakat Aceh telah memperkuat sistem reformasi pendidikan agama di Aceh, yang tercermin dari meningkatnya jumlah madrasah yang diprakarsai oleh PUSA di hampir seluruh wilayah Aceh.

Akhirnya untuk mempercepat misi PUSA untuk memajukan pendidikan Islam di Aceh, beberapa petinggi PUSA berkumpul dan bermusyawarah di Cot Meurak, Bireuen. Hasilnya pada tanggal 27 Desember 1939 mereka sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam di Aceh yang diberi nama Normal Islam Institut (NII) yang berpusat di Bireuen. Pada saat itu ditugaskan Tgk. M. Nur El Ibrahimy sebagai direktur utama. Pengangkatannya sebagai direktur bukan tanpa alasan, sebab El Ibrahimy merupakan seorang lulusan dari Universitas Al-Azhar dan Darul Ulum di Mesir. Selanjutnya untuk wakil direktur PUSA menugaskan Teuku Muhammad yang merupakan alumni dari Rechts Hoge School di Jakarta (Sufi, 2007).



**Gambar 4:** Para pengurus PUSA setelah pendirian NII tanggal 27 Desember 1939

*Sumber: Arsip Buku M. Nur El Ibrahimy*

Adapun tujuan pendirian sekolah NII ini adalah dikhususkan untuk menjadi sekolah perguruan tinggi dengan visi misi berhaluan islamis modern dan mencetak guru-guru yang nantinya dipersiapkan untuk mengajar di berbagai madrasah seluruh Aceh. Sekolah NII dijadwalkan untuk mulai mengajar pada tanggal 15 Desember 1939, namun pembukaan resminya sempat tertunda karena intervensi yang berlebihan dari Pemerintah Hindia Belanda. Awalnya Belanda melarang prinsip-prinsip yang di bawa sekolah NII dan bahkan tidak setuju dengan penunjukan Tgk. M. Nur El Ibrahimy sebagai direktur, karena ia dianggap sangat anti-kolonial. Belanda sebelumnya telah melarangnya mengajar di Madrasah Nahdatul Islam di Idi, Aceh Timur, selama dua tahun (Anis, 2015).

Pada tahun pertama pendiriannya, siswa yang bersekolah di NII ini berjumlah 57 orang, yang terdiri dari 55 putera Aceh, seorang putera Minangkabau dan seorang dari Palembang. Dalam perjalanannya, NII telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat

Aceh. Manfaat bagi masyarakat Aceh terutama dalam membuka pola pikir konservatif yang pada umumnya masih menguasai masyarakat Aceh (Sufi, 2007).

Ketika Jepang mulai menduduki Aceh pada tahun 1942, nama sekolah NII diubah menjadi Sekolah Normal Islam, namun kebijakan sekolah tetap tidak berubah. Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaannya dari pendudukan Jepang pada tahun 1945, sekolah ini dipindahkan dari kota kecil Bireun ke Banda Aceh setahun kemudian pada tahun 1946. Nama sekolah juga diubah lagi, kali ini menjadi "Sekolah Guru Islam" (Latif, 1992).

Pada masa ini, lembaga ini mengalami perubahan struktural yang signifikan; selain perubahan nama dan manajemen, kepala sekolah juga diganti; kepala sekolah yang baru adalah Abdul Gani Usman. Lulusan NII dipekerjakan sebagai guru di sekolah-sekolah umum dan madrasah di seluruh Aceh (Fatianda, 2022). Beberapa lulusan memutuskan untuk bergabung dengan birokrasi sebagai pegawai pemerintah pada masa awal kemerdekaan. Sekolah NII telah menjadi lembaga pendidikan yang terkenal dan sangat dihormati oleh masyarakat Aceh karena NII telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat selama ini karena telah mampu mengubah pola pikir masyarakat dari pola pikir lama menjadi lebih terbuka dan modern (Latif, 1992).

### **Normal Islam Institut dan Usaha Pemajuan Pendidikan Islam di Aceh**

Sesuai dengan tujuan pembentukan PUSA, sekolah NII memang telah disiapkan untuk menjadi sebuah lembaga pendidikan yang dibangun oleh masyarakat Aceh. Dengan harapan mampu untuk menjawab tantangan zaman melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Aceh yang sanggup bersaing dengan masyarakat luar termasuk bersaing dalam melawan Belanda melalui jalur politik. Para pemimpin pusa merasa sulit untuk menemukan guru-guru yang berkualitas dan mampu memberikan pengajaran yang baik. Dengan pemikiran tersebut, NII diharapkan dapat melahirkan guru-guru yang mampu mendukung tujuan tersebut (Latif, 1992).

Setelah pembentukannya NII ini hadir secara nyata dengan menerapkan sistem dan terobosan baru yang sebelumnya belum pernah ada dan dipraktikkan oleh lembaga pendidikan tradisional di Aceh. Teungku Muhammad Daud Beureueh yang merupakan seorang tokoh reformis, Tgk. M. El Ibrahimy yang berasal dari universitas Al-Azhar di Mesir, dan beberapa tokoh pemikir di PUSA yang lainnya benar-benar serius untuk membenahi sistem pendidikan Islam di Aceh.

Keberadaan sekolah NII ini telah berhasil menorehkan prestasi yang patut dibanggakan khususnya dalam hal mendidik para anak-anak Aceh untuk menjadi seorang pelajar hingga guru yang paham ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Beberapa usaha dan terobosan yang dilakukan oleh NII ini adalah,

### **Integrasi Kurikulum Ilmu Pengetahuan Agama dan Umum**

Dalam rangka untuk merespon terhadap masalah pendidikan di Aceh yang masih didominasi oleh sistem tradisional yang memprioritaskan pelajaran agama dan ibadah murni dalam semua mata pelajaran. Organisasi PUSA melalui sekolah NII rekomendasikan untuk menstandarkan kurikulum sekolah agama dengan mengintegrasikan pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Menurut catatan sejarah, gerakan ini merupakan tonggak penting dalam upaya reformasi pendidikan Islam di Aceh.

NII mulai mengembangkan kurikulum yang secara bertahap menggabungkan pelajaran agama dan beberapa pelajaran umum. Metode pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, terutama dengan ilmu pengetahuan modern (Shabri, 2005). Masyarakat Aceh yang masih berpikir tradisional pada dasarnya menolak ilmu pengetahuan yang diajarkan dengan huruf latin karena dianggap sebagai ilmu pengetahuan Belanda. Menanggapi penolakan ini, PUSA mengubah nama setiap mata



pelajaran umum menjadi bahasa Arab dan juga mengajarkannya dalam bahasa Arab (Anis, 2015). Sebagai contoh, matematika disebut sebagai ilmu alriyadiah. Hal ini didasarkan pada paradigma masyarakat Aceh pada saat itu, yang menganggap bahwa setiap ilmu pengetahuan yang memiliki nama Arab adalah ilmu agama Islam.

NII menerapkan kebijakan bahwa ilmu agama dan ilmu umum sama pentingnya untuk kemajuan peradaban manusia. Jika pendidikan dayah tradisional lemah dalam pengetahuan umum, hal yang sama juga berlaku jika sekolah umum lemah dalam memberikan pengetahuan agama. Hal ini dapat menghambat perkembangan pendidikan di Aceh (R. S. & A. B. Wibowo, 2009). Oleh karena itu, sekolah NII menghendaki adanya konvergensi antara kurikulum dayah yang bercirikan penekanan pada pendidikan agama dan kurikulum sekolah umum yang hanya mengajarkan pengetahuan umum.

Sekolah NII menawarkan empat konsentrasi mata pelajaran kepada para siswanya diantaranya

- a. Ilmu Arab, yang terdiri dari *Mutalaah* (Pemahaman Bacaan), *Insha'* (Komposisi), *Al-Adab Al-Arabi* (Sastra Arab), *Nahwu Saraf* (Tata Bahasa Arab), *Balaghah* (Ilmu Retorika), *Khat* (Kaligrafi), dan *Mahfuzat* (Hafalan)
- b. Ilmu Agama, yang terdiri dari pelajaran Fiqh, *Tarikh Al Tashri'* (Sejarah Hukum Islam), Usul Fiqh, Tauhid, Hadist, Tafsir Qur'an, dan Sejarah Islam
- c. Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, yang terdiri dari Matematika, Geografi, Ilmu Politik, dan sosiologi
- d. Ilmu Bahasa, yang terdiri dari pelajaran bahasa Indonesia, Bahasa Belanda, dan Bahasa Inggris

Reformasi kurikulum ini diimplementasikan melalui integrasi pelajaran agama dan umum. Integrasi ini diimplementasikan melalui masuknya pelajaran matematika dan bahasa Inggris ke dalam kurikulum pendidikan Islam di madrasah dan dayah. Demikian pula, PUSA juga memasukkan pelajaran agama (naqliyah) ke dalam kurikulum sekolah umum. Untuk mendukung program ini, PUSA mendirikan dua sekolah menengah pertama di Bireuen dan Idi serta sekolah menengah atas di Kutaraja pada tahun 1952 (Syamsuddin, 1990).

### **Pembaharuan Sistem dan Birokrasi Pendidikan**

NII mengadaptasi sejumlah karakteristik yang dimodelkan pada sistem pendidikan Belanda. Hal ini termasuk program empat tahun di mana siswa diharapkan untuk maju berdasarkan nilai, kehadiran wajib, ujian reguler dan pemberian gelar setelah menyelesaikan seluruh program. Pimpinan PUSA menginginkan NII menjadi perpaduan antara Dayah dan sekolah Belanda. Tujuan dari sekolah ini adalah untuk mempersiapkan guru-guru secara pedagogis dan akademis dalam hal mata pelajaran dan metodologis. PUSA juga mengembangkan dan menawarkan program pelatihan guru untuk madrasah (Latif, 1992). Para direktur PUSA merasa kesulitan untuk menemukan guru yang berkualitas dan mampu mengajar dengan baik. Sehingga keberadaan NII diharapkan mampu untuk mencetak para guru-guru yang berkualitas dan mampu mengajarkan pelajaran dengan konsep yang lebih terstruktur dan mengedepankan prinsip kemajuan.

Kurikulum yang digunakan di NII ini serupa dengan Sekolah Normal Islam yang berada di Sumatera Barat. Durasi studi untuk setiap siswa adalah empat tahun. Selain kelas, para siswa juga berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan siswa. Kegiatan-kegiatan ini termasuk organisasi pramuka, *kasyaffatul Islam* dan organisasi mahasiswa Himpunan Pelajar Islam Aceh (HIMPIA) sebagai sebuah wadah bagi siswa untuk dapat mengembangkan soft skill dan hard skill mereka (Depdikbud, 1984).

Guru-guru yang diundang untuk mengajar di sekolah ini tidak hanya berasal dari Aceh, tetapi juga dari sekolah-sekolah umum, seperti Teuku Muhammad, mantan murid

Rechtoogesholl di Jakarta, serta Murdani dan A. Gani Usman, yang merupakan guru-guru senior di Taman Siswa Bireun (Latif, 1992). Dengan kelengkapan guru yang lengkap, didukung oleh suasana sekolah yang baik, menjadikan NII sebagai sekolah yang berkualitas di Aceh. Murid-muridnya bahkan dapat menguasai bahasa asing seperti Inggris, Arab, Belanda, dan Perancis (Depdikbud, 1984).

Para alumni sekolah NII ini telah berhasil dan disebarkan sebagai guru di sekolah-sekolah umum dan madrasah di seluruh Aceh. Beberapa lulusan memutuskan untuk bergabung dengan birokrasi sebagai pejabat pemerintah pada masa awal kemerdekaan. Sekolah NII telah menjadi lembaga pendidikan yang terkenal dan sangat dihargai oleh masyarakat Aceh, karena NII telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dengan mengubah pola pikir mereka dari yang kuno menjadi berpikiran terbuka dan modern (Fatianda, 2022).

### **Sekolah NII Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia**

Pemerintahan baru Aceh setelah kemerdekaan sebagian besar terdiri dari anggota PUSA, termasuk Tgk. Nur El Ibrahimy, mantan direktur lembaga tersebut. Dia sekarang menjadi inspektur daerah untuk sekolah-sekolah Islam. Sekolah Tinggi Keguruan Islam dan semua madrasah ditempatkan di bawah otoritas agama. Hal ini memungkinkan Tgk. Nur El Ibrahimy dapat secara tidak langsung mempengaruhi kinerja seluruh sistem pendidikan (R. S. & A. B. Wibowo, 2009).

Perkembangan Sekolah Tinggi Keguruan Islam ditingkatkan dengan bantuan tidak langsung dari anggota PUSA yang menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Namun, kelemahan utama adalah bahwa ruang lingkup kurikulum dikurangi, yang membuat tingkat Sekolah Tinggi Keguruan Islam menjadi satu tingkat lebih rendah dari sebelumnya. Kebijakan ini diusulkan oleh pejabat pemerintah lainnya yang menginginkan sekolah ini dapat mengejar ketertinggalan dari sekolah menengah lainnya di Indonesia (Latif, 1992). Keterlibatan aktif PUSA dalam Sekolah Guru Islam secara bertahap menurun setelahnya hingga akhirnya sekolah ini sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah.

### **SIMPULAN**

Kemunduran ini disebabkan oleh sikap represif pemerintah Belanda terhadap para ulama dan santri di *dayah* tradisional. Tindakan ini didasari oleh ketakutan bahwa jika lembaga pendidikan *dayah* terus berkembang, mereka akan menghasilkan ulama dan santri yang nantinya akan memberontak terhadap Belanda. Akhirnya, pemerintah Belanda membakar sejumlah *dayah* beserta perpustakaanannya. Peristiwa ini sangat membatasi pendidikan tradisional di Aceh, sehingga tidak dapat menanamkan pengetahuan yang berkaitan dengan kemajuan dan semangat juang. Satu-satunya materi yang dapat diajarkan adalah masalah keberagaman dan ibadah murni.

Normal Islam Institut (NII) merupakan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang didirikan oleh organisasi PUSA pada 27 Desember 1939. Pendirian sekolah ini adalah untuk memberikan sistem pendidikan modern yang terintegrasi antara kurikulum agama dan ilmu umum. Fokus NII adalah untuk mencetak para guru-guru yang modernis untuk disebarkan mengajar di seluruh madrasah yang berada di bawah naungan PUSA. Usaha yang dilakukan oleh NII dalam memajukan pendidikan di Aceh adalah dengan menerapkan sistem perpaduan antara ilmu pengetahuan agama dan semesta.

NII menerapkan kebijakan bahwa ilmu agama dan ilmu umum sama pentingnya untuk kemajuan peradaban manusia. NII mengadaptasi sejumlah karakteristik yang dimodelkan pada sistem pendidikan Belanda. Hal ini termasuk program empat tahun di mana siswa diharapkan untuk maju berdasarkan nilai, kehadiran wajib, ujian reguler dan pemberian gelar setelah menyelesaikan seluruh program. Para siswa yang belajar juga dibekali dengan

kegiatan ekstrakurikuler termasuk organisasi pramuka, *kasyaffatul Islam* dan organisasi mahasiswa Himpunan Pelajar Islam Aceh (HIMPIA). Penelitian ini merupakan sebuah penelitian terhadap sejarah pendidikan di Aceh pada masa awal abad ke-20. Aceh sebagai daerah yang memiliki sejarah yang panjang terutama dalam bidang pendidikan menjadikannya sebagai satu topik bahasan yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pemantik bagi penulis lain untuk melihat bagaimana dinamika pendidikan Islam yang terjadi di Aceh dan Nusantara pada umumnya. Dalam konteks lokal, sejarah pendidikan ini masih sangat minim sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengungkapkan kembali sejarah yang pernah mewarnai daerah kita pada masa lalu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (1993). *Agama dan Perubahan Sosial Di Aceh*. Rajawali Press.
- Abdurahman, D. (2011). Metodologi Penelitian Sejarah Islam. In *Penerbit Ombak*. Penerbit Ombak.
- Alfian, I. (1997). *Segi-Segi Budaya Masyarakat Aceh*. LP3ES.
- Amiruddin, H. (2004). *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*. Ceninnets Press.
- Anis, M. (2015). Peran PUSA terhadap Lembaga Pendidikan Madrasah di Aceh Awal Abad XX. *Jurnal Seuneubok Lada*, 2(1), 52–69. <http://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jsnbl/article/view/557>
- Depdikbud, T. (1984). *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Fatianda, S. (2022). *Persaingan Politik Dua Penguasa Besar Dunia Islam Abad 15 M*. 7(2), 174–189. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/adabiya/article/view/14028/pdf>
- Fatianda, S. & Badrun (2022). Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dan Reformasi Pendidikan Islam di Aceh, 1939-1952. *Local History & Heritage*, 2(1), 23–30. <http://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/LHH/article/view/323>
- Hadi, A. (2008). *KERAJAAN ACEH ( Sebuah Kajian Historis )*. XXXII(1), 104–121.
- Hadi, A. (2014). Dinamika Sistem Institusi Pendidikan Di Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 179–194.
- Herlina, N. (2020). Metode sejarah. In *Satya Historika*. [http://digilib.isi.ac.id/6127/2/Pages from Metode Sejarah Revisi Akhir 2020.pdf](http://digilib.isi.ac.id/6127/2/Pages%20from%20Metode%20Sejarah%20Revisi%20Akhir%202020.pdf)
- Ibrahim, M. (2014). Dayah, mesjid, meunasah sebagai lembaga pendidikan dan lembaga dakwah di Aceh. *Jurnal Al-Bayan*, 21(30), 21–34. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/121%0Ahttp://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605911940>
- Ibrahimi, M. N. El. (1986). *Teungku Muhammad Daud Bereueh Peranannya dalam Pergolakan di Aceh*. Gunung Agung.
- Ismuha. (1996). Mengenang Kembali Lahirnya PUSA, 30 Tahun Yang Lalu. *Buletin Darussalam*, 43–45.
- Jodi, J., Fatianda, S., & Stiawan, R. (2023). The Political Movement of The Unity of Ulama Throughout Aceh (Pusa) and Its Implications on Social and Political Life in Aceh 1939-1962. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 9(2), 234–258. <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v9i2.231>

- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah (Kedua)*. Tiara Wacana Yogya.
- Kurniati, D. (2021). Ulama-Ulama Sufi Penyebar Islam dari Aceh (Biografi, Karya dan Ajaran). *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.29300/tjksi.v6i1.4398>
- Latif, H. A. (1992). *Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) its contributions to educational reforms in Aceh*. McGill University.
- Marhamah. (2018). Pendidikan Dayah dan Perkembangannya di Aceh. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 71–92. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tadib/article/download/117/78/>
- Muhajir, A. (2018). Langkah Politik Belanda di Aceh Timur: Memahami Sisi Lain Sejarah Perang Aceh, 1873-1912. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 160–171. <https://doi.org/10.30743/mkd.v1i2.515>
- Nuraini. (2014). Potret Islam Tradisi Onal “ Dayah Dan Ulama Di Aceh Abad Ke- 20 .” *Mudarrisuna*, 4(2), 249–288.
- Shabri. (2005). *Biografi Ulama-ulama di Aceh Abad XX (III)*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Trasional Banda Aceh.
- Shaleh, A. (1982). *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren*. Dirjen Kalender Agama Islam Departemen Agama RI.
- Solikah, L. (2013). Perkembangan Agama dan Budaya Islam di Aceh Pada Masa Sultan Iskandar Muda (1607-1637). *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(1), 44–51. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/1100>
- Sufi, R. (1998). *Gerakan Nasionalisme di Aceh (1900-1942)*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Trasional Banda Aceh.
- Sufi, R. (2007). *Organisasi-organisasi Pergerakan Nasional Di Aceh Awal Abad 20*. Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Sukmana, W. J. (2021). Metode Penelitian Sejarah (Metode Sejarah). *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2), 1–4.
- Syamsuddin, N. (1990). *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (pp. 1–377).
- Wibowo, A. B. (2005). *Dinamika dan Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)*. BPNB Aceh.
- Wibowo, R. S. & A. B. (2009). *Pendidikan di Aceh dari Masa ke Masa*. Badan Arsip dan Perpustakaan NAD.